



Judul : Kewenangan luas, BPIP nggak perlu jadi kementerian
Tanggal : Sabtu, 15 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kewenangan Luas BPIP Nggak Perlu Jadi Kementerian

WAKIL Ketua Baleg DPR Martin Manurung menilai, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak perlu dijadikan setingkat kementerian. Lembaga tersebut telah memiliki kewenangan setingkat kementerian dan untuk saat ini tidak ada urgensi menaikkan statusnya.

"Tanpa perlu diubah menjadi kementerian, status BPIP saat ini pun juga sudah setingkat kementerian. Memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pembinaan Pancasila di lintas kementerian," ujar Martin dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Dia menjelaskan usulan penguatan BPIP muncul bersamaan dengan pembahasan Panitia Kerja Baleg terhadap RUU BPIP. Revisi UU justru bertujuan mempertegas fungsi BPIP, bukan mengubah format kelembagaannya.

Anggota Fraksi Partai NasDem itu mengingatkan, revisi diperlukan agar BPIP memiliki dasar hukum yang lebih kokoh. Revisi UU BPIP, sambungnya, memiliki kedudukan yang lebih kuat dengan dasar hukum UU, sehingga mampu lebih maksimal menjalankan fungsinya. "Secara khusus untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh warga negara," ucapnya.

Anggota Baleg Andreas Hugo Pareira juga menolak usul usulan tersebut. Menurutnya, ide dasar UU BPIP adalah menjalankan pembinaan ideologi Pancasila melalui sebuah badan. Sehingga, usulan menjadi kementerian dinilai telah melenceng.

"Tidak sejalan dengan ide dasar UU ini dibuat. Karena ide dasar pembentukan UU adalah Pembinaan Pancasila oleh sebuah Badan yang namanya BPIP," kata wakil ketua Komisi XIII DPR itu.

Dia meminta agar status

BPIP tetap menjadi badan. Sebab, jika diubah menjadi kementerian, konsekuensinya akan diatur lewat UU Kementerian Negara. "Sedangkan kementerian itu diatur dalam UU Kementerian Negara, jadi BPIP ya tetap menjadi badan," tegas politikus PDIP itu.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menambahkan, usulan tersebut masih sebatas wacana. Intinya adalah bagaimana memaksimalkan kinerja BPIP untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Sedangkan untuk mengubah lembaganya menjadi kementerian belum jadi usulan resmi.

Bob mengatakan, saat ini Panitia Kerja (Panja) RUU BPIP di Baleg masih merumuskan ihwal pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan BPIP. Pembahasan itu tidak menyangkut perluasan kewenangan badan tersebut.

"Intinya bagaimana kerja BPIP harus lebih fokus pada pembinaan ideologi Pancasila saja, bukan perluasan kewenangan di luar daripada pembinaan ideologi Pancasila," ujar Legislator Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, perubahan status BPIP menjadi lembaga kementerian diusulkan Benny K Harman dalam rapat lanjutan membahas RUU BPIP di Baleg DPR, Selasa (12/11/2025). Dalam rapat itu, dia mengaku belum melihat urgensi penyusunan atau keberadaan UU BPIP. Padahal, itu seharusnya tertuang pada bagian pertimbangan.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku tak memahami tantangan yang dihadapi Pancasila saat ini. Sehingga, usulan agar BPIP menjadi lembaga kementerian perlu dipertimbangkan. Jika memang Pancasila dianggap penting, maka seharusnya lembaganya adalah kementerian, bukan badan. ■ PYB